

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Bukan Pajak pasal 1 ayat 1, penerimaan negara bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Dari penjelasan undang-undang tersebut, maka secara eksplisit dapat diartikan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak memiliki kekhususan atau karakteristik yang berbeda dengan pengelolaan pendapatan negara dari sektor penerimaan perpajakan, penerimaan bea dan cukai, maupun penerimaan negara lainnya. Hal ini karena PNBP tidak dipungut dari seluruh masyarakat, melainkan dari masyarakat yang menerima manfaat langsung atas layanan yang disediakan oleh pemerintah, dan tidak semua masyarakat membutuhkan layanan tersebut.

Karena kekhususan ini juga, biaya atas pelaksanaan layanan-layanan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat tersebut tidak ditanggung seluruh masyarakat. Masyarakat yang menggunakan layanan pemerintah akan diwajibkan membiayai sebagian dana yang dibutuhkan pemerintah untuk menyediakan layanan tersebut. PNBP yang diterima dari masyarakat kemudian menjadi sebagian biaya yang digunakan pemerintah untuk membiayai masing-masing output (jasa atau produk) yang dibutuhkan oleh masyarakat. Teori atas penerepan konsep ini dinamakan *earmarking* atau *earmarked*.

Rencana PNBP disusun untuk setiap bagian anggaran dalam bentuk rencana PNBP tingkat satuan kerja, rencana PNBP tingkat Unit Eselon I, dan Rencana PNBP tingkat kementerian/lembaga atau bagian anggaran. Dalam menyusun rencana PNBP, kementerian/lembaga berpedoman pada rencana PNBP tahun anggaran berjalan, realisasi PNBP tahun anggaran sebelumnya, dan kebijakan pemerintah.

Penerimaan pendapatan PNBP merupakan penerimaan yang berkontribusi besar terhadap APBN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Bukan Pajak pasal 1 ayat 9, salah satu jenis penerimaan PNBP yaitu pelayanan dengan segala bentuk penyediaan barang, jasa, atau pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab pemerintah, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akibat adanya pandemi COVID-19, kegiatan pelayanan pemerintah mengalami banyak kendala yang berdampak pada realisasi penerimaan PNBP atas layanan pemerintah tersebut. Menyikapi gejala ekonomi akibat COVID-19,

pemerintah melakukan dua kali perubahan UU Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Perubahan pertama dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Perubahan kedua dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Tahun 2021, postur APBN masih berfokus terhadap percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Pemerintah melalui pendapatan negara harus tetap mendukung pemulihan ekonomi, dan juga harus memberikan beberapa insentif pajak yang terukur agar memberikan akselerasi ekonomi. Salah satunya dengan menerbitkan skema fasilitas potongan 100% tarif PPnBM untuk kendaraan bermotor dengan maksimal segmen 1.500 cc kategori sedan, mobil dengan kandungan lokal 70%, dan mobil roda empat dengan sistem penggerak 4x2 yang tertuang dalam PMK Nomor 31/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan analisis dan kajian terhadap dampak kebijakan relaksasi PPnBM 100% terhadap penerimaan PNPB atas layanan penerbitan surat kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Sibolga. Analisis akan dilakukan

terhadap capaian realisasi ketiga PNBP tersebut selama pandemi COVID-19 dan dengan berlakunya relaksasi PPnBM tarif 0%. Hasil analisis tersebut akan dituangkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “Analisis Dampak Tarif PPnBM 0% terhadap Penerimaan PNBP Kendaraan Bermotor Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Sibolga Tahun Anggaran 2020-2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut merupakan rumusan masalah dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini, antara lain:

1. Bagaimana perbandingan capaian realisasi penerimaan PNBP sebelum dan selama pandemi COVID-19 atas layanan penerbitan surat kendaraan bermotor Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Sibolga yang dianalisis melalui Laporan Realisasi PNBP tahun anggaran 2020-2021.
2. Bagaimana dampak relaksasi PPnBM terhadap capaian realisasi penerimaan PNBP atas layanan penerbitan surat kendaraan bermotor Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Sibolga yang dianalisis melalui Laporan Realisasi PNBP tahun anggaran 2020-2021.
3. Apa permasalahan dan kendala terkait pencapaian realisasi penerimaan PNBP anggaran Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Sibolga tahun anggaran 2020-2021.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang dicapai dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan membandingkan capaian realisasi penerimaan PNBPN sebelum dan selama pandemi COVID-19 atas layanan Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Penerbitan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor (TCKB), dan Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Sibolga tahun anggaran 2020-2021.
2. Mengetahui dampak relaksasi PPnBM terhadap capaian realisasi penerimaan PNBPN atas layanan Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Penerbitan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor (TCKB), dan Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Sibolga tahun anggaran 2020-2021.
3. Mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Sibolga dalam mencapai realisasi penerimaan PNBPN tahun anggaran 2020-2021.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pada Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini, ruang lingkup pembahasan difokuskan pada analisis atas capaian realisasi penerimaan PNBPN sebelum dan selama pandemi COVID-19 atas layanan Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Penerbitan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor (TCKB), dan Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Sibolga tahun anggaran 2020 s.d. 2021. Penulis akan menguraikan serangkaian data dan fakta terkait capaian realisasi PNBPN tersebut yang akan dianalisis berdasarkan target dan capaian realisasi penerimaan

PNBP. Selain itu, penulis akan melakukan identifikasi terkait permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Sibolga dalam mencapai capaian realisasi penerimaan PNBP khususnya selama masa pandemi.

1.5 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Karya tulis tugas akhir ini digunakan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat kelulusan guna mencapai gelar Ahli Madya Kebendaharaan Negara dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Selain itu, karya tulis tugas akhir ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait penerimaan PNBP atas penerbitan surat kendaraan bermotor selama adanya pandemi COVID-19 di lingkup kerja Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Polres Sibolga.
2. Memberikan informasi kepada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Sibolga terkait perbandingan capaian penerimaan PNBP atas layanan Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Penerbitan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor (TCKB), dan Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebelum dan selama pandemi COVID-19 serta pengaruh yang diberikan oleh relaksasi PPnBM sebagai referensi dan masukan dalam pengambilan kebijakan dan penyusunan Rencana PNBP pada tahun anggaran selanjutnya.
3. Menjadi referensi dan masukan bagi penulis lain yang ingin melakukan pengkajian lebih lanjut terkait dampak relaksasi PPnBM terhadap penerimaan

PNBP baik pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) maupun pada satker lainnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis menyusun dan menguraikan KTTA menjadi kerangka yang sistematis agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami oleh pembaca. Sesuai dengan Peraturan Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN Nomor PER-9/PKN/2020 tentang Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Sebagai Tugas Akhir Mahasiswa dan Pelaksanaan Ujian Komprehensif Politeknik Keuangan Negara STAN, maka KTTA ini terdiri dari tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

Bagian awal terdiri dari judul, persetujuan, pernyataan lulus dari tim penilai, pernyataan keaslian, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Bagian utama terdiri dari empat bab. Bab pertama yaitu pendahuluan yang memuat latar belakang masalah dari topik yang dipilih oleh penulis, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan. Bab kedua yaitu landasan teori yang berisi teori/asumsi/ketentuan serta penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas oleh penulis dalam KTTA ini. Bab ketiga yaitu metode dan pembahasan terdiri atas metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan yang berfokus pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Sibolga, dan pembahasan hasil. Dalam KTTA ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data studi lapangan yang terdiri dari wawancara dan observasi.

Pembahasan hasil berisi tentang analisis yang dilakukan oleh penulis untuk menjawab ketiga rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Perbandingan capaian realisasi penerimaan PNBPN sebelum dan selama pandemi COVID-19 atas layanan penerbitan surat kendaraan bermotor Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Sibolga yang dianalisis melalui Laporan Realisasi PNBPN tahun anggaran 2020-2021.
2. Dampak atau korelasi relaksasi PPnBM terhadap capaian realisasi penerimaan PNBPN atas layanan penerbitan surat kendaraan bermotor Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Sibolga yang dianalisis melalui Laporan Realisasi PNBPN tahun anggaran 2020-2021.
3. Permasalahan dan kendala terkait pencapaian realisasi penerimaan PNBPN anggaran Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Sibolga tahun anggaran 2020-2021.

Bab keempat merupakan simpulan yang ditarik dari uraian pada bab-bab sebelumnya. Bagian akhir terdiri atas daftar pustaka, lampiran-lampiran termasuk pedoman wawancara, surat riset serta riwayat hidup dari penulis.